

SKRIPSI

**ARAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PENUNJANG WISATA
DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI**

Disusun dan diajukan oleh

MOH. FACHMI ANSHARY MAKMUR

D521 16 517



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)
ARAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PENUNJANG WISATA
DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

MOH. FACHMI ANSHARY MAKMUR


D52116517

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001


Dr. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T
NIP. 19681022 200003 2 001

Ketua Program Studi,
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin


Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, S.T., M.Si
NIP. 19741006 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Fachmi Anshary Makmur
NIM : D521 16 517
Prodi Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

Arahan Pengembangan Permukiman Penunjang Wisata Desa Tongke- Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Moh. Fachmi Anshary Makmur

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya sehingga pembuat tugas akhir yang berjudul “Arahan Pengembangan Permukiman Penunjang Wisata Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” ini dapat diselesaikan.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung baik dalam bentuk motivasi dan saran/kritikan dalam penyusunan tugas akhir ini. Penulis banyak mengalami kendala namun arahan dan bimbingan yang sangat besar dengan sabar diberikan oleh para dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Kiranya penulis merasa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengarapkan kritik dan saran kepada pembaca yang sifatnya membangun sehingga penelitian ini dapat lebih baik ke depannya. Akhir kata semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Agustus 2022

Moh. Fachmi Anshary Makmur

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu untuk menerangi dunia. Selayaknya manusia biasa yang memiliki keterbatasan, dalam proses penyelesaian tugas akhir ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Ayah Ir. Makmur Tasbih dan Ibu St. Sohrah Amin S.H) atas cinta, doa, waktu, pengorbanan, tenaga, pikiran, ilmu dan segalanya yang dilimpahkan kepada penulis tanpa ada batasan;
2. Saudara-saudara terkasih (drh. Fachira Ulfa Makmur S.Kh dan Nurul Chumairah azzahrah Makmur) atas doa, kasih sayang, kesabaran dan pengabdian kepada penulis;
3. Rektor Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Jamaluddin Jompa, M.Sc) atas kebijakan dan nasihat yang diberikan kepada penulis;
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Bapak Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
5. Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.) atas kebijakan, dukungan dan bimbingannya kepada penulis;
6. Dosen Pembimbing Utama (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si.) atas ilmu, motivasi, waktu, tenaga dan khususnya untuk nilai kedisiplinan dan keramahan hati yang beliau ajarkan;
7. Dosen Pembimbing Pendamping (Ibu Dr. Wiwik Wahidah Osman, S.T., M.T.) atas nasihat, kasih sayang dan arahan yang diberikan selama masa perkuliahan kepada penulis;
8. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr-techn. Yashinta K.D. Sutopo, ST., MIP.) yang tiada hentinya memberi motivasi, bimbingan, doa serta selalu mengingatkan penulis akan Allah SWT;

9. Dosen Penguji (Ibu Dr-techn. Yashinta K.D. Sutopo, ST., MIP.) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Dosen Penguji (Ibu Jayanti Mandasari A. Munawarah Abduh, ST.,M.Eng.) atas kesediaannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyempurnaan tugas akhir ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen *LBE* Perumahan dan Permukiman (Prof. Dr. Ir. Shirley Wunas, DEA) yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis;
12. Seluruh dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin atas ilmu, bimbingan dan waktu yang diberikan kepada penulis;
13. Seluruh staf administrasi dan pelayanan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Bapak Haerul Muayyar, S.Sos, Bapak Faharuddin, dan Bapak Syawalli) yang senantiasa dengan kemurahan hatinya membantu penulis dalam kelengkapan administrasi dari awal perkuliahan hingga saat ini;
14. Teman-teman Angkatan RADIUS 2016 atas kebahagiaan, pengalaman, dan kebersamaan yang diukir selama empat tahun;
15. Teman-teman seperjuangan *Labo-Base Housing and Settlement* (Sri Hasnianti Rahman, S.T., Musdalifah, S.T., Novita Kumala Putri, S.T., Adinda Febriyanti, S.T., Amrullah, S.T., Amaliah Rizki Ramadhani JB, S.T., Nur Atria Yusuf, S.T., Syifa Beby Alisha K.R.I, S.T., Maudy Intan Astari, Rhara Dharmawan Noer, Dimas Ramadhandy Sekeon, S.T., Christoper Batara Tikupadang, S.T., Muh. Farid Usman, Rifat Alfasya, dan Muh. Fauzul Adhim Gazali) atas bantuan, motivasi keceriaan, kebersamaan dan kemurahan hati untuk berbagi ilmu dengan penulis;
16. Keluarga besar HMPWK FT-UH atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga;
17. Keluarga besar UKM Bola Basket UNHAS atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga;
18. Teman Sepergaulan Fourty Five atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga;

19. Keluarga besar One Team atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga;
20. Keluarga besar KOSTEL atas kebersamaan dan pengalaman yang sangat berharga; dan
21. Serta seluruh masyarakat Desa Tongke-tongke atas dukungan, doa, serta keramahannya selama proses pengumpulan data.

Penulis menyadari ucapan terima kasih tak akan mampu membalas kebaikan dan keikhlasan hati pihak-pihak terkait. Hanya untaian doa dapat dihaturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda atas segala bantuan. *Aamiin*.

Makassar, 23 Agustus 2022

Moh. Fachmi Anshary Makmur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 <i>Output</i> Penelitian	5
1.6 <i>Outcome</i> Penelitian.....	5
1.7 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.8 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Permukiman.....	7
2.1.1 Pengertian Permukiman.....	7
2.1.2 Klasifikasi dan Tipe Permukiman	8
2.1.3 Karakteristik Permukiman.....	10
2.2 Permukiman Penunjang Wisata	10
2.3 Kriteria Sarana dan Prasarana Permukiman (SNI 03-1733-2004)	12

2.3.1	Kriteria Sarana Permukiman	12
2.3.2	Kriteria Prasarana Permukiman	25
2.4	Pariwisata.....	32
2.4.1	Daerah Tujuan Pariwisata.....	33
2.4.2	Komponen Pendukung Pariwisata.....	33
2.4.3	Jenis-Jenis Fasilitas Wisata	35
2.4.4	Bentuk-Bentuk Pariwisata	35
2.4.5	Komponen Produk Wisata.....	37
2.4.6	Unsur-Unsur Pariwisata.....	39
2.4.7	Tujuan Pengadaan Fasilitas Wisata	41
2.3.10	Petunjuk Operasional Pengadaan Sarana Pengunjung Wisata	41
2.4	Penelitian Terdahulu.....	44
2.5	Kerangka Konsep	47
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian	48
3.2	Lokasi Penelitian	48
3.3	Sumber Data	51
3.3.1	Data Primer.....	51
3.3.2	Data Sekunder.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data	52
3.4.1	Observasi	52
3.4.2	Dokumentasi.....	52
3.4.3	Wawancara	52
3.5	Teknik Analisis Data	53
3.6	Variabel Kebutuhan Data	55
3.7	Definisi Operasional.....	61
3.8	Kerangka Penelitian.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		63
4.1	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sinjai Timur.....	63

4.1.1	Letak Geografis	63
4.1.2	Topografi	65
4.1.3	Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.....	65
4.1.4	Kondisi Kependudukan	66
4.1.5	Status Kepemilikan Lahan.....	67
4.1.6	Kondisi Ekonomi.....	67
4.2	Gambaran Umum Desa Tongke-tongke.....	67
4.2.1	Letak Wilayah.....	67
4.2.2	Luas Wilayah.....	69
4.2.3	Demografi.....	69
4.2.4	Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk.....	70
4.3	Potensi Objek Wisata Hutan Mangrove Desa Tongke-tongke.....	74
4.3.1	Aspek Fasilitas.....	75
4.3.2	Aspek Biologis	77
4.3.3	Aspek Rekreasi	77
4.3.4	Aspek Edukasi	78
4.3.5	Aspek Konservasi	79
4.3.6	Aspek Aksesibilitas	81
4.4	Karakteristik Permukiman Desa Tongke-tongke	81
4.4.1	Pola Sebaran Permukiman	81
4.4.2	Kepadatan Bangunan	83
4.4.3	Keteraturan Bangunan dan Kondisi Fisik Bangunan	83
4.5	Karakteristik Permukiman Sebagai Penunjang Wisata di Desa Tongke-tongke.....	85
4.5.1	Kriteria Sarana Permukiman Desa Tongke-tongke.....	85
4.5.2	Kriteria Prasarana Permukiman Desa Tongke-tongke	114
4.6	Arahan Pengembangan Desa Tongke-tongke Menggunakan Analisis SWOT.....	136
4.6.1	Isu-Isu Pembangunan Desa Tongke-tongke	136
4.6.2	Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).....	136
4.6.3	Analisis Faktor Internal	155

4.6.4 Analisis Faktor Eksternal.....	157
4.6.5 Arahana Pengembangan Permukiman Desa Tongke-tongke Sebagai Penunjang Wisata.....	165
BAB V PENUTUP	176
5.1 Kesimpulan.....	176
5.2 Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	178
CURRICULUM VITAE	183

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan Sarana Peribadatan	16
Tabel 2.2	Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga.....	19
Tabel 2.3	Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi.....	21
Tabel 2.4	Sarana Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga....	24
Tabel 2.5	Klasifikasi Jaringan Jalan.....	26
Tabel 2.6	Standar Perencanaan Prasarana Jaringan Persampahan	27
Tabel 2.7	Bagian Jaringan Drainase.....	28
Tabel 2.8	Kebutuhan dan Persyaratan Jaringan Transportasi Lokal pada Lingkungan Perumahan.....	31
Tabel 2.9	Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1	Daftar Nama Narasumber	52
Tabel 3.2	Matriks SWOT	54
Tabel 3.3	Kebutuhan Data.....	55
Tabel 4.1	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Sinjai Timur	63
Tabel 4.2	Data Kependudukan Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2014-2018	66
Tabel 4.3	Data Kepadatan Penduduk Sinjai Timur Tahun 2018.....	66
Tabel 4.4	Komposisi Peruntukan Lahan	69
Tabel 4.5	Jumlah Kepala Keluarga	69
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 4.7	Jenis Pekerjaan Masyarakat	70
Tabel 4.8	Tingkat Pendidikan	71
Tabel 4.9	Aktifitas Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat.....	73
Tabel 4.10	Acuan Kriteria Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Permukiman	86
Tabel 4.11	Acuan Kriteria Sarana Pendidikan dan Pembelajaran	90
Tabel 4.12	Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	93
Tabel 4.13	Acuan Kriteria Sarana Kesehatan di Permukiman.....	93
Tabel 4.14	Acuan Kriteria Sarana Peribadatan di Permukiman.....	96

Tabel 4.15	Acuan Kriteria Sarana Perdagangan dan Niaga di Permukiman	99
Tabel 4.16	Acuan Kriteria Sarana Kebudayaan dan Rekreasi di Permukiman	102
Tabel 4.17	Acuan Kriteria Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Permukiman.....	105
Tabel 4.18	Acuan Kriteria Prasarana Jaringan Jalan di Permukiman....	114
Tabel 4.19	Panjang Jalan Kawasan Permukiman Desa Tongke-tongke	116
Tabel 4.20	Acuan Kriteria Prasarana/Utilitas Jaringan Persampahan di Permukiman	116
Tabel 4.21	Acuan Kriteria Prasarana/Utilitas Jaringan Listrik di Permukiman	119
Tabel 4.22	Acuan Kriteria Prasarana/Utilitas Jaringan Air Bersih di Permukiman	122
Tabel 4.23	Acuan Kriteria Prasarana Jaringan Drainase di Permukiman	125
Tabel 4.24	Acuan Kriteria Prasarana/Utilitas Jaringan Air Limbah di Permukiman	127
Tabel 4.25	Acuan Kriteria Prasarana/Utilitas Jaringan Telepon di Permukiman	130
Tabel 4.26	Acuan Kriteria Prasarana/Utilitas Jaringan Transportasi Lokal di Permukiman.....	132
Tabel 4.27	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.....	159
Tabel 4.28	Matriks SWOT	160
Tabel 4.29	Proyeksi Jumlah Pengunjung Wisata Hutan Mangrove 2021-2041	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peran Akomodasi dalam Pariwisata	34
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	47
Gambar 3.1	Peta Lokasi Penelitian Desa Tongke-tongke.....	49
Gambar 3.2	Peta Lokasi Penelitian di Permukiman Desa Tongke-tongke	50
Gambar 3.3	Kerangka Penelitian.....	62
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kecamatan Sinjai Timur	64
Gambar 4.2	Peta Administrasi Desa Tongke-tongke	68
Gambar 4.3	Aktivitas Perikanan di Desa Tongke-tongke.....	70
Gambar 4.4	Aktivitas Keterlibatan Masyarakat Sekitar.....	74
Gambar 4.5	Peta Fasilitas Wisata Hutan Mangrove.....	76
Gambar 4.6	Vegetasi Utama Hutan Mangrove	77
Gambar 4.7	Panorama Wisata Hutan Mangrove.....	78
Gambar 4.8	Pusat Informasi Sebagai Aspek Edukasi	79
Gambar 4.9	Aktivitas Penanaman Mangrove	79
Gambar 4.10	Peta Aksesibilitas Wisata	80
Gambar 4.11	Peta Pola Persebaran Permukiman	82
Gambar 4.12	Peta Kondisi Fisik Bangunan	84
Gambar 4.13	Peta Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Desa Tongke-tongke.....	88
Gambar 4.14	Peta Titik-titik Sarana dan Radius Pelayanan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Desa Tongke-tongke	89
Gambar 4.15	Peta Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Desa Tongke-tongke	93
Gambar 4.16	Peta Titik-titik Sarana dan Radius Pelayanan Sarana Pendidikan Desa Tongke-tongke.....	94
Gambar 4.17	Peta Sarana Kesehatan Desa Tongke-tongke	97

Gambar 4.18	Peta Titik-titik Sarana dan Radius Pelayanan Kesehatan Desa Tongke-tongke.....	98
Gambar 4.19	Peta Sarana Peribadatan Desa Tongke-tongke	101
Gambar 4.20	Peta Titik-titik Sarana dan Radius Pelayanan Sarana Peribadatan Desa Tongke-tongke.....	102
Gambar 4.21	Peta Sarana Perdagangan dan Niaga Desa Tongke-tongke	105
Gambar 4.22	Peta Titik-titik Sarana dan Radius Pelayanan Sarana Perdagangan dan Niaga Umum Desa Tongke-tongke.....	106
Gambar 4.23	Peta Sarana Kebudayaan dan Rekreasi Desa Tongke-tongke	109
Gambar 4.24	Peta Titik-titik Sarana dan Radius Pelayanan Kebudayaan dan Rekreasi Desa Tongke-tongke	110
Gambar 4.25	Peta Sarana Ruang Terbuka Desa Tongke-tongke	113
Gambar 4.26	Peta Prasarana Jalan Desa Tongke-tongke	115
Gambar 4.27	Peta Prasarana Persampahan Desa Tongke-tongke.....	118
Gambar 4.28	Peta Prasarana Listrik Desa Tongke-tongke.....	121
Gambar 4.29	Peta Prasarana Air Bersih Desa Tongke-tongke	124
Gambar 4.30	Peta Prasarana Drainase Desa Tongke-tongke	126
Gambar 4.31	Peta Prasarana Air Limbah/MCK Desa Tongke-tongke ..	129
Gambar 4.32	Peta Prasarana Jaringan Telepon Desa Tongke-tongke	131
Gambar 4.33	Peta Prasarana Transportasi Lokal Desa Tongke-tongke	134
Gambar 4.34	Peta Titik-titik Prasarana Desa Tongke-tongke.....	135
Gambar 4.35	Analisis SWOT	162
Gambar 4.36	Proyeksi Jumlah Pengunjung Wisata Hutan Mangrove 2021-2041	166
Gambar 4.37	Arahan Penyediaan Fasilitas <i>Homestay</i>	168
Gambar 4.38	Arahan Penyediaan Fasilitas TPS Kontainer, Tempat Sampah dan Kondisi Eksisting.....	169
Gambar 4.39	Kondisi Eksisting Toilet dan Arahan Peningkatan Toilet	170
Gambar 4.40	Arahan Peningkatan Pusat Kuliner dan Toko Cindramata dan Kondisi Eksisting.....	171

Gambar 4.41	Arahan Peningkatan Jalan dan Kondisi Eksisting Jalan...	171
Gambar 4.42	Arahan Peningkatan Kualitas Parkir dan Kondisi Eksisting Lokasi Parkir.....	172
Gambar 4.43	Arahan Peningkatan Pedestrian dan Kondisi Eksisting Kawasan	173
Gambar 4.44	Arahan Pengembangan Rambu-rambu Lalulintas dan Papan Petunjuk Araha dan Kondisi Eksisting Papan Petunjuk Arah.....	173
Gambar 4.45	Peta Arahan Pengembangan Permukiman Penunjang Wisata	175

**ARAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PENUNJANG WISATA
DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI**

Moh. Fachmi Anshary Makmur¹⁾, Mimi Arifin²⁾, Wiwik Wahidah Osman³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: fachmi_a27@yahoo.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: w_wahidahosman@yahoo.com

ABSTRAK

Kekayaan hutan mangrove Desa Tongke-tongke lebih dikenal dengan laboratorium mangrove Sulawesi Selatan. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi ekowisata atau pariwisata yang berbasis ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kondisi karakteristik permukiman yang berada di Desa Tongke-tongke; (2) menganalisis kondisi sarana dan prasarana yang dapat menunjang wisata di Desa Tongke-tongke; (3) memberikan arahan pengembangan untuk menunjang kawasan wisata Desa Tongke-tongke. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tongke-tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, metode komparatif, dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kondisi karakteristik permukiman yang berada di Desa Tongke-tongke memiliki pola permukiman yang berbentuk linier dengan kepadatan bangunan 20,08 bangunan per hektar, serta kondisi fisik bangunan yang beragam yang didominasi oleh bangunan permanen; (2) kondisi sarana dan prasarana yang dapat menunjang wisata di Desa Tongke-tongke, masih belum memberikan pelayanan yang maksimal seperti kondisi yang rusak dan tidak sesuai dengan standar, serta masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia dan belum terpenuhi di permukiman Desa Wisata Tongke-tongke; (3) arahan pengembangan untuk menunjang kawasan wisata yaitu penyediaan homestay, pelayanan kebersihan, ruang ganti dan toilet, pusat kuliner dan cindramata, peningkatan kualitas jalan, peningkatan kualitas parkir, pedestrian, rambu-rambu lalu lintas dan papan petunjuk arah wisata.

Kata Kunci: Permukiman, sarana, prasarana, wisata, Tongke-tongke

**DIRECTIVE ON DEVELOPMENT OF TOURIST SUPPORT SETTLEMENT
DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI**

Moh. Fachmi Anshary Makmur¹⁾, Mimi Arifin²⁾, Wiwik Wahidah Osman³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: fachmi_a27@yahoo.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: w_wahidahosman@yahoo.com

ABSTRACT

The richness of the mangrove forest in Tongke-tongke Village which is better known as the South Sulawesi mangrove laboratory. This potential can be developed into ecotourism or economic-based tourism. This study aims to (1) identify the characteristics of the settlements in Tongke-tongke Village; (2) analyzing the condition of facilities and infrastructures that can support tourism in Tongke-tongke Village; (3) provide development directions to support the tourism area of Tongke-tongke Village. The location of this research is in Tongke-tongke Village, East Sinjai District, Sinjai Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews. The analytical method used is descriptive qualitative analysis, comparative method, and SWOT analysis. The results of this study indicate that: (1) the characteristic conditions of settlements in Tongke-tongke Village have a linear pattern of settlements with a building density of 20.08 buildings per hectare, as well as various physical conditions of buildings dominated by permanent buildings; (2) the condition of facilities and infrastructure that can support tourism in Tongke-tongke Village, still does not provide maximum service such as damaged conditions and not in accordance with standards, and there are still some facilities and infrastructure that are not yet available and not fulfilled in the Tourism Village settlements. Tongke-tongke; (3) development directions to support tourist areas, namely providing homestays, cleaning services, changing rooms and toilets, culinary and souvenir centers, improving road quality, improving parking quality, pedestrians, traffic signs and tourist directions.

Keywords: *Settlement, facilities, Infrastructure, Tourism, Tongke-tongke*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian negara berkembang, salah satu negaranya adalah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, wisata selalu menjadi kebutuhan dasar tiap manusia untuk menghilangkan kejenuhan yang dilakukan setiap hari. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pada tahun 2018 kepariwisataan Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 153,25 triliun atau 3,09 persen dari total PDB Indonesia, serta pada tahun 2019 kontribusinya meningkat menjadi 3,25 persen (BPS, 2020). Melihat fakta bahwa manusia akan selalu membutuhkan wisata, maka industri pariwisata akan selalu menjadi hal yang tidak akan pernah mati (Razak dan Suprihardjo, 2013).

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata. Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Indonesia memiliki banyak peluang dan tantangan. Hal ini disebabkan oleh keragaman yang ada dan produk yang sangat banyak untuk ditawarkan. Disamping berbagai dampak yang dinilai positif, terdapat pula dampak negatif yang tidak diharapkan. Dampak negatif tersebut disebabkan oleh pengembangan pariwisata yang hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi serta pariwisata dipresepsikan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam bidang usaha swasta dan pemerintah (Adisasmita, 2010).

Beberapa penelitian menyadari bahwa pariwisata juga membutuhkan lingkungan yang baik, tetapi dalam pengembangannya tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kerentanan lingkungan terhadap jumlah wisatawan yang akan menimbulkan dampak negatif, khususnya pada kawasan desa wisata (Bachtiar dkk, 2018)

Berdasarkan karakteristik utama, daerah di Indonesia didominasi oleh kawasan perdesaan. Kawasan permukiman perdesaan menjadi salah satu objek yang paling

digemari oleh para wisatawan yang berkarakter *Nature Based*. Terdapat kecenderungan yang jenuh terhadap wisata modern dan keinginan kembali pada kehidupan alam pedesaan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta melihat aktivitas sosial budayanya. Hal ini menjadi dorongan untuk terus mengembangkan pariwisata di daerah pedesaan yang dikemas dalam bentuk desa wisata (Budiarti dkk, 2021).

Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun ini berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, hal ini sangat berpotensi untuk melakukan beberapa usaha dalam meningkatkan daya tarik pariwisata di provinsi tersebut. Salah satu destinasi wisata yang tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Wisata Alam Hutan Mangrove yang berada di Desa Tongke-tongke. Bagian timur laut Kabupaten Sinjai berjejeran rimbunan hutan bakau yang tertata alami. Pesisir laut Tongke-tongke menampakkan keindahan panorama alam dan berbagai jenis spesies binatang yang bisa kita lihat pada saat berkunjung di objek Wisata Hutan Bakau Tongke-tongke. Wisata alam ini terletak di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (Hidayatullah dkk, 2016).

Kekayaan hutan bakau Desa Tongke-tongke lebih dikenal dengan laboratorium bakau Sulawesi Selatan. Hutan bakau yang sangat luas dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dapat dikembangkan menjadi wisata edukasi karena hutan bakau tersebut sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032 yang berkejasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain menjadi wisata rekreasi, hutan bakau tersebut diharapkan pengunjung juga dapat belajar mengenai budaya, biota laut, keragaman hayati atau hutan mangrove. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi ekowisata atau pariwisata yang berbasis ekonomi.

Ekowisata memanfaatkan potensi kawasan wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Untuk menunjang kawasan wisata tersebut dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan, sehingga kawasan wisata tersebut lebih berkembang dan berdampak positif bagi masyarakat di sekitarnya (Paputungan dkk, 2014).

Potensi ekowisata yang terdapat di Desa Tongke-tongke sangat diperlukan untuk memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, khususnya area permukiman yang berada di kawasan tersebut. Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, permukiman sekitar kawasan hutang mangrove masih terdapat rumah yang berdampak terhadap air pasang (banjir ROB). Kondisi permukiman juga terlihat pada perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga berdampak pada hutan mangrove.

Sejalan dengan dinamika pembangunan yang berkelanjutan diperlukan adanya gerakan perkembangan pariwisata yang merambah pada berbagai terminologi, seperti *sustainable tourism development*, *village tourism*, *ecotourism*. Hal ini merupakan pendekatan pengembangan kapariwisata yang berupaya menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata, bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata (Suharsono, 2009). Untuk itulah diperlukan suatu alternatif solusi yang berkelanjutan dalam penunjang kawasan wisata sekitar hutan mangrove Tongke-tongke demi keberlangsungan fungsi kawasan sebagai daerah konservasi dengan memperhatikan kondisi karakteristik permukiman sekitar hutan mangrove. Dari penjelasan tersebut maka penulis terdorong mengambil topik permasalahan dengan judul Arahan Pengembangan Permukiman Penunjang Wisata Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi karakteristik permukiman yang berada di Desa Tongke-tongke?
2. Bagaiman kondisi sarana dan prasarana yang dapat menunjang wisata di Desa Tongke-tongke?
3. Bagaimana arahan pengembangan untuk menunjang kawasan wisata Desa Tongke-tongke?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi karakteristik permukiman yang berada di Desa Tongke-tongke;
2. Menganalisis kondisi sarana dan prasarana yang dapat menunjang wisata di Desa Tongke-tongke; dan
3. Memberikan arahan pengembangan untuk menunjang kawasan wisata Desa Tongke-tongke.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan studi terhadap bidang ilmu pengembangan wilayah, terutama dalam merumuskan arahan pengembangan permukiman sebagai penunjang wisata di suatu daerah;
2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai, terutama pada Dinas Pariwisata untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan permukiman di sekitar objek wisata, sebagai penunjang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat menjadi andalan bagi pemasukan PAD Kabupaten Sinjai; dan
3. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata agar dapat mengembangkan permukiman di sekitar objek wisata. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah kawasan permukiman menjadi lebih baik. Suatu kawasan wisata dapat berkembang bila permukiman di sekitar kawasan wisata dapat menunjang kebutuhan wisatawan yang akan datang.

1.5 Output Penelitian

Output penelitian yang dihasilkan, yaitu:

1. Laporan penelitian yang tersusun secara sistematis sebagai latihan pengembangan dan penerapan ilmu perencanaan wilayah dan kota; dan
2. Adanya arahan pengembangan untuk menunjang permukiman wisata Desa Tongke-tongke.

1.6 Outcome Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka *outcome* yang diharapkan yaitu:

1. Meningkatnya perhatian masyarakat dan pemerintah terkait pentingnya pariwisata di sekitar permukiman; dan
2. Adanya arahan pengembangan untuk menunjang permukiman wisata Desa Tongke-tongke.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

a. Secara Substansial

Penelitian ini berfokus pada peningkatan suatu permukiman penunjang wisata, menyusun suatu arahan dimana permukiman yang berada di sekitar lokasi wisata perlu peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini dapat memberikan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Selain sarana dan prasarana masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari usaha kecil, seperti berjualan *souvenir* khas daerah tersebut, serta membuka restoran atau *cafe* yang dapat dijadikan sebagai tempat bersantai bagi wisatawan. Dalam hal ini pendapatan masyarakat dapat meningkat dengan karena adanya kawasan wisata yang dapat menunjang permukiman di sekitarnya.

b. Secara Wilayah

Kawasan yang menjadi objek penelitian ini masuk dalam wilayah administrasi Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima, yaitu:

Bagian pertama memuat uraian latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi civitas akademik, pemerintah, dan masyarakat, uraian mengenai ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bagian kedua memuat kajian literatur, berupa pengertian, ketentuan dan kajian teori berupa pembahasan mengenai perumahan dan permukiman, pariwisata, serta prasarana dasar permukiman.

Bagian ketiga menjelaskan mengenai proses penelitian yang dilakukan, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penjabaran defisini operasional, serta pemaparan kerangka penelitian.

Bagian keempat membuat tentang gambaran umum wilayah studi dan pemaparan data yang telah dikumpulkan, pengolahan data, serta analisis yang dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pertama.

Bagian kelima memuat kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Terdapat pula uraian saran yang berkaitan dengan arahan pengembangan permukiman penunjang wisata di studi kasus. Terdapat pula saran yang diajukan untuk para peneliti dimasa mendatang yang hendak mengambil permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permukiman

Pembahasan terkait pengertian, klasifikasi, pola, dan karakteristik permukiman telah dijelaskan dalam regulasi dan jurnal terkait. Adapun beberapa penjelasannya dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan pokok manusia diantaranya adalah pangan, sandang, permukiman, dan kesehatan. Dari kelima kebutuhan pokok manusia, permukiman yang menempati posisi yang sentral. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup.

Perumahan dan permukiman adalah tempat atau daerah dimana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama, dimana mereka dapat membangun sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan (Simaela dkk, 2019). Menurut Budijharjo (1998) dalam Dariwu & Waani (2016) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia dapat tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan dengan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya.

Kuswantojo (1997) dalam Kustiwan & Ramadhan (2019) permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas dari pada perumahan yang hanya merupakan

wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah alam, lingkungan, jaringan, dan isinya manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permukiman merupakan sekumpulan perumahan atau dimana penduduk bertempat tinggal yang dihuni oleh manusia dan melangsungkan kehidupannya, dimana tempat melakukan bersosialisasi dan berinteraksi.

2.1.2 Klasifikasi dan Tipe Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

A. Klasifikasi Fungsi Bangunan

Menurut Mumford (*The Culture Of Cities*, 1938) dalam Wesnawa (2015:27) mengemukakan bahwa terdapat enam jenis kota berdasarkan tahap perkembangan permukiman penduduk kota. Jenis tersebut diantaranya:

1. Tahap *eropolis* merupakan perkembangan desa yang sudah teratur dan masyarakatnya merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke arah kehidupan kota;
2. Tahap *polis* merupakan suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat dari agraris;
3. Tahap *metropolisi* merupakan suatu wilayah kota yang ditandai dengan adanya penduduk sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri;
4. Tahap *megapolis* merupakan suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu, sehingga membentuk jalur perkotaan;
5. Tahap *tryanopolis* adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu lintas, dan tingginya tingkat kriminalitas; dan

6. Tahap *necropolis* (kota mati) adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya.

B. Tipe Permukiman

Menurut Syarifuddin dkk (2021) mengemukakan bahwa tipe permukiman dapat dibedakan menjadi dua tipe permukiman, yaitu:

1. Tipe Permukiman Berdasarkan Waktu Hunian

Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari (rumah tenda penduduk pengembara), dihuni hanya untuk beberapa bulan (kasus perumahan peladang berpindah secara musiman), dan hunian hanya untuk beberapa tahun (kasus perumahan peladang berpisah tergantung kesuburan tanah). Tipe permanen umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat berlangsung hidup dengan nyaman.

2. Tipe Permukiman Menurut Karakteristik Fisik dan Non-Fisik

Pada hakikatnya permukiman memiliki struktur yang dinamis yang dapat berubah dan setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman yang besar karena perubahan yang disertai oleh pertumbuhan. Sebagai suatu permukiman yang semakin besar, secara mendasar dapat berubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi, dan kepentingannya. Jadi jika tempat terisolasi sepanjang tahun kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis suatu kota besar, maupun kecil akan menghindari kemandekan. Kota akan berkembang baik ke arah vertikal maupun horizontal, fungsi baru berkembang dan fungsi lama menghilang, serta pengalaman sosial dan transformasi ekonomi mengalami perkembangan pula.

Pada akhirnya untuk hal yang terpenting mempertimbangkan bahwa semua permukiman memiliki jati diri masing-masing secara khas. Baik tanpa fisik, peranan dan fungsi, sejarah, arsitektur, serta perencanaan jalan pada setiap permukiman yang memiliki keunikan sendiri.

2.1.3 Karakteristik Permukiman

Permukiman identik dengan perumahan masyarakat. Karakteristik permukiman dalam penelitian ini, peneliti menghubungkannya dengan permukiman. Karakteristik permukiman adalah ciri dan fisik permukiman yang berada dalam satu lingkungan dengan kondisi yang kurang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan permukimannya. Menurut Rebecca dalam Koswara (2019) menyatakan bahwa karakteristik permukiman yang paling menonjol adalah kualitas bangunan dan kerapatan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan dan saluran drainase yang tidak memadai sehingga secara berkala mengalami banjir.

Dalam rangka program dan proyek peningkatan kualitas lingkungan, khususnya permukiman di perkotaan, memang perlu dilakukan telaah (assessment) dan penilaian atas kondisi permukiman. Ukuran atau penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas permukiman antara lain: kepadatan bangunan, kerapatan bangunan, kondisi jalan, sanitasi dan pasokan air bersih, dan kualitas konstruksi perumahan Akbar, (2018). Tahapan identifikasi karakteristik permukiman dengan cara identifikasi secara mendalam, langkah identifikasi ini sangat penting untuk dilakukan sebelum proses perumusan arahan dalam penelitian (Pangaribuan & Haryanto, 2019).

2.2 Permukiman Penunjang Wisata

Permukiman dapat diartikan sebagai bentuk baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Berdasarkan pendekatan struktural, pembahasan tentang permukiman tidak terlepas dari disiplin ilmu geografi manusia, yang secara mendalam dipelajari pada geografi permukiman. (Yunus, 1987 dalam Wesnawa, 2010:1). Dimasa sekarang perkembangan permukiman sangat pesat dari berbagai macam sudut kepentingan dengan satu tujuan yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya, salah satunya adalah perkembangan permukiman pariwisata.

Perkembangan suatu daerah dari aspek pariwisata dapat dilakukan dengan mengekspose ciri khas serta potensi pariwisata yang ada di daerahnya sehingga

menjadi destinasi wisata tentunya berpotensi meningkatkan citra dari daerah tersebut, termasuk permukiman yang berubah menjadi kampung/desa wisata yang bisa mengangkat citra kampung/desa tersebut dengan ciri khas yang berbeda-beda tiap kampung/desa. Biasanya wisatawan yang datang ke destinasi wisata berupa kampung/desa wisata selain untuk berekreasi, mayoritas wisatawan biasanya berkunjung untuk melakukan studi banding atau study tour, sehingga menurut tujuannya jenis pariwisata ini termasuk dalam wisata edukasi yang menurut Suwena dan Widayatmaja (2017) merupakan jenis pariwisata yang dilakukan wisatawan dengan tujuan untuk belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan objek wisata yang dikunjungi.

Permukiman yang bertajuk pada pendekatan pariwisata tentu harus mengakomodir segala aspek-aspek sarana penunjang wisata. Adapun yang dimaksud sarana penunjang wisata yaitu antara lain (Yoeti, dalam Ghani, 2017).

1. Sarana pokok (main tourism superstructure) Menurut (Lothar dalam Yoeti, 1996) sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: travel agent, tour operator, angkutan wisata, rumah makan, akomodasi objek wisata, dan atraksi wisata.

2. Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Supplementing Tourism Superstructure) Sarana pelengkap kepariwisataan, yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: sarana olahraga dan sarana pariwisata sekunder, serta amusement lainnya (Yoeti, dalam Ghani 2017).

3. Sarana Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism Superstructure) Sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi memiliki fungsi lain yaitu, membuat wisatawan atau pengunjung daerah tujuan wisata lebih banyak mengeluarkan dan membelanjakan uangnya di tempat tujuan wisata yang mereka kunjungi.

Prasarana pariwisata merupakan fasilitas yang memungkinkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan berwisata Suwena, (2017). Untuk prasarana pariwisata ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Prasarana Umum

Prasarana umum yang dimaksud dalam hal ini adalah fasilitas umum yang mendukung berjalannya kegiatan wisata. Adapun fasilitas yang harus ada di daerah tujuan wisata, antara lain: pembangkit tenaga listrik, penyediaan air bersih, jaringan jalan raya, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara, dan fasilitas komunikasi.

2. Prasarana Kebutuhan Masyarakat

Prasarana ini berfungsi untuk kebutuhan masyarakat di kawasan wisata dan sekitarnya. Adapun prasarana yang diperlukan, seperti: rumah sakit, apotek, kantor pos, bank, pompa bensin. Ini sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan pariwisata.

2.3 Kriteria Sarana dan Prasarana Permukiman (SNI 03-1733-2004)

Pembahasan terkait kriteria sarana dan prasarana permukiman telah dijelaskan dalam regulasi dan jurnal terkait. Adapun beberapa penjelasannya dijabarkan sebagai berikut.

2.3.1 Kriteria Sarana Permukiman

A. Sarana Pemerintahan

Dasar penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum berfungsi untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (kelurahan dan kecamatan) dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang termasuk dalam sarana pelayanan umum dan pemerintahan, adalah:

1. Kantor pelayanan atau administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan;
2. Kantor pelayanan utilitas umum dan jasa, seperti layanan air bersih (PAM), listrik (PLN), telepon, dan pos; dan

3. Pos pelayanan keamanan dan keselamatan, seperti pos pemadam kebakaran.

B. Sarana Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (kelurahan, kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat pra belajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU) dan perguruan tinggi/akademi dan pendidikan yang nonformal. Adapun penggolongan untuk kebutuhan sarana pendidikan adalah sebagai, berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
2. Sekolah Dasar (SD) yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD); dan
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca.

C. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan

penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Berikut beberapa jenis sarana yang dibutuhkan untuk perencanaan lokasi permukiman. Adapun beberapa jenis sarana kesehatan yang dibutuhkan adalah sebagai, berikut:

1. Posyandu berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
2. Balai pengobatan warga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*currative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
3. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)/Klinik Bersalin berfungsi untuk melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
4. Puskesmas dan balai pengobatan berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
5. Puskesmas pembantu dan balai pengobatan berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
6. Tempat praktik dokter merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
7. Apotek berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

D. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan yang berfungsi untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan pada lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan

masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut:

1. Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar;
2. Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid;
3. Kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan; dan
4. Kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan.

Adapun kebutuhan sarana peribadatan pada permukiman, dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut ini:

Tabel 2.1 Kebutuhan Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Satuan Sarana		Standar (m ² /jiwa)	Radius Pencapaian	Kriteria
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)			Lokasi dan Penyelesaian
1.	Mushollah/langgar	250	45	100 bila bangunan tersedia	0,36	100 m	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Masjid warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	Masjid lingkungan (kelurahan)	30.000	1.800	3.600	0,12	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Masjid kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03	-	Berdekatan dengan pusat lingkungan/ kelurahan sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5.	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan/ hierarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

Sumber: SNI 03-1733-2004

E. Sarana Perdagangan dan niaga

Sarana perdagangan dan niaga tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

1. Jenis Sarana

Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a. toko/warung warung, yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari (skala pelayanan unit RT \approx 250 penduduk);
- b. pertokoan, yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya (skala pelayanan 6.000 penduduk);
- c. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan \approx 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya; dan
- d. pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan \approx 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

2. Kebutuhan Ruang dan Lahan

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a. warung/toko yang membutuhkan luas lantai sebesar 50 m^2 termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m^2 ;
- b. pertokoan dengan skala pelayanan untuk 6.000 penduduk yang membutuhkan luas lantai sebesar 1.200 m^2 . Sedangkan untuk luas tanah yang dibutuhkan sebesar 3.000 m^2 . Bangunan pertokoan dilengkapi dengan:
 - 1) tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
 - 2) sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga; dan
 - 3) pos keamanan.
- c. Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan dengan skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk yang membutuhkan luas tanah seluas 10.000 m^2 . Bangunan pusat pertokoan/pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:
 - 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2) terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - 3) pos keamanan;
 - 4) sistem pemadam kebakaran; dan
 - 5) musholla/tempat ibadah.
- d. pusat perbelanjaan dan niaga dengan skala pelayanan unit kelurahan ≈ 120.000 penduduk yang membutuhkan luas seluas 36.000 m^2 . Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:
 - 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2) terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - 3) pos keamanan;
 - 4) sistem pemadam kebakaran; dan
 - 5) musholla/tempat ibadah.

Tabel 2.2 Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga

No	Jenis Sarana	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /Jiwa)	Radius Pencapaian	Kriteria
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan (m ²)			Lokasi dan Pencapaian
1.	Toko/Warung	250	50 (Termasuk Gudang)	100 (Bila Berdiri Sendiri)	0,4	300 m ²	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari kelompok lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m ²	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat di jangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Toko+Pasar+Bank+Kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parker sesuai ketentuan setempat

Sumber: SNI 03-1733-2004

F. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagai bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktu yang berbeda.

1. Jenis Sarana

Penetapan jenis/macam sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu daerah sangat tergantung pada kondisi setempat area tersebut, yaitu menyangkut faktor-faktor:

- a. tata kehidupan penduduknya; dan
- b. struktur sosial penduduknya.

Menurut lingkup pelayanannya, jenis sarana kebudayaan dan rekreasi meliputi:

- a. balai warga/balai pertemuan (skala pelayanan unit RW \approx 2.500 penduduk);
- b. balai serbaguna (skala pelayanan unit Kelurahan \approx 30.000 penduduk);
- c. gedung pertemuan/gedung serbaguna (skala pelayanan unit kecamatan \approx 120.000 penduduk); dan
- d. bioskop (skala pelayanan unit kecamatan \approx 120.000 penduduk).

2. Kebutuhan Ruang dan Lahan

Kriteria kebutuhan ruang dan lahan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Balai warga/balai pertemuan
Luas lantai yang dibutuhkan 150 m^2 , luas lahan yang dibutuhkan 300 m^2 .
- b. Balai serbaguna
Luas lantai yang dibutuhkan 500 m^2 , luas lahan yang dibutuhkan 1.000 m^2 .
- c. Gedung pertemuan/gedung serbaguna
Luas lantai yang dibutuhkan 1.500 m^2 , luas lahan yang dibutuhkan 2.500 m^2 .
- d. Bioskop
Luas lantai yang dibutuhkan 1.000 m^2 dan luas lahan yang dibutuhkan 2.000 m^2 (dapat menjadi bagian dari pusat perbelanjaan dan niaga).

Tabel 2.3 Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

No	Jenis Sarana	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Pencapaian
1.	Balai warga/ balai pertemuan	2.500	150	300	0,12	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Balai serbaguna/ balai karang taruna	30.000	250	500	0,017	100 m'	Di pusat lingkungan
3.	Gedung serbaguna	120.000	1.500	3.000	0,025	100 m'	Dapat di jangkau dengan kendaraan umum
4.	Gedung bioskop	120.000	1.000	2.000	0,017	100 m'	Terletak di jalan utama. Dapat merupakan bagian dari pusat perbelanjaan

Sumber: SNI 03-1733-2004

G. Sarana Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan".

1. Jenis Sarana

Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis ruang terbuka hijau tersebut yaitu:

- a. setiap unit RT , kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak;
- b. setiap unit RW, kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat main anak-anak dan lapangan olah raga kegiatan olah raga;
- c. setiap unit Kelurahan kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka, seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya;
- d. setiap unit Kecamatan kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka;
- e. setiap unit Kecamatan kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai kuburan/pemukaman umum;

- f. selain taman dan lapangan olah raga terbuka, harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar;
- g. diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar; dan
- h. pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (*river walk*) dan olahraga.

2. Kebutuhan Lahan

Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m²/penduduk. Kebutuhan lahan tersebut adalah:

- a. taman untuk unit RT, 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m² atau dengan standar 1 m² /penduduk;
- b. taman untuk unit RW, 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m² atau dengan standar 0,5 m² /penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya;
- c. taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan, 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m² atau dengan standar 0,3 m² /penduduk;
- d. taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan, 120.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 24.000 m² (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m² /penduduk;
- e. dibutuhkan jalur hijau seluas 15m² / penduduk yang lokasinya menyebar; dan
- f. besarnya lahan kuburan/pemakaman umum tergantung dari sistem penyempurnaan yang dianut sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Acuan perhitungan luasan berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan.

3. Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria sarana ruang terbuka mempertimbangkan lokasi penempatan dan penyelesaian ruang. Persyaratan dan kriteria ruang terbuka dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut ini.

Tabel 2.4 Sarana Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (m ²)	Standar (m ²)	Radius Pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman/ Tempat main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga
2	Taman/ Tempat main	2.500	1.250	0,5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan
3	Taman dan Lapangan Olahraga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
4	Taman dan Lapangan Olahraga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
5	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar
6	Kuburan/ Pemakaman umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani

Sumber: SNI 03-1733-2004

2.3.2 Kriteria Prasarana Permukiman

A. Jaringan Jalan

Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Dalam merencanakan jaringan jalan, harus mengacu pada ketentuan teknis tentang pembangunan prasarana jalan perumahan, jaringan jalan dan geometri jalan yang berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan jalan pergerakan kendaraan dan manusia, dan akses penyelamatan dalam keadaan darurat drainase pada lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan) oleh Dirjen Cipta Karya tahun 1998.

Adapun kriteria prasarana jaringan jalan di permukiman dapat dilihat pada **Tabel 2.5** sebagai berikut ini.

Tabel 2.5 Klasifikasi Jaringan Jalan

Hierarki Jalan Perumahan	Dimensi Dari Elemen-Elemen Jalan			Dimensi Pada Daerah Jalan				GSB min. (m)	Keterangan
	Perkerasan (m)	Bahu Jalan (m)	Pedestrian (m)	Trotoar (m)	Damaja (m)	Damija (m)	Dawasja min. (m)		
Lokal sekunder I	3-7 (mobil-motor)	1.5-2 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggung cacat roda)	0.5	10-12	13	4	10.5	-
Lokal sekunder II	3-6 (mobil-motor)	1.5-2 (darurat parkir)	1.5 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggung cacat roda)	0.5	10-12	12	4	10	-
Lokal sekunder III	3 (mobil-motor)	0.5 (darurat parkir)	1.2 (pejalan kaki, vegetasi, penyanggung cacat roda)	0.5	8	8	3	7	Khusus pejalan kaki
Lingkungan I	1.5-2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	-	0.5	3.5-4	4	2	4	Khusus pejalan kaki
Lingkungan II	1.2 (pejalan kaki, penjual dorong)	0.5	-	0,5	3.2	4	2	4	Khusus pejalan kaki

Sumber: SNI 03-1733-2004

B. Jaringan Persampahan

Aktivitas kawasan permukiman dan perumahan tidak terlepas dari sampah, sampah merupakan barang-barang buangan bekas pakai dari rumah tangga. Apabila tidak ditangani dengan baik, tumpukan sampah akan mengotori lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pembuangan sampah yang terkoordinasi dan terkontrol. Adapun kebutuhan prasarana jaringan persampahan di permukiman dapat dilihat pada **Tabel 2.6** berikut ini.

Tabel 2.6 Standar Perencanaan Prasarana Jaringan Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi	
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	-
RW (2.500 Jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Gerobak pengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m ³	
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m ³	Gerobak pengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m ³	
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TP A lokal	-	Mobil pengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		25 m ³	

Sumber: SNI 03-1733-2004

C. Jaringan Listrik

Lingkungan perumahan harus dilengkapi perencanaan penyediaan jaringan listrik sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang mengacu pada:

1. SNI 04-6267.601-2002 tentang istilah kelistrikan (Bab 601: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik-Umum);
2. SNI 04-6267.601-2002 tentang istilah kelistrikan (Bab 602: Pembangkitan); dan;
3. SNI 04-6267.601-2002 tentang istilah kelistrikan (Bab 603: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik-Perencanaan dan Manajemen Sistem Tenaga Listrik).

D. Jaringan Air Bersih

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan, adalah:

1. Kebutuhan air bersih;
2. Jaringan air bersih;
3. Kran umum;
 - a. Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa;
 - b. Radius pelayanan maksimum 100 m; dan
 - c. Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari.
4. Hidran kebakaran;
 - a. Untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200 m;
 - b. Jarak dengan tepi jalan minimum 300 m; dan
 - c. Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran.

E. Drainase

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Bagian dari jaringan drainase dapat dilihat pada **Tabel 2.7** berikut ini:

Tabel 2.7 Bagian Jaringan Drainase

Sarana	Prasarana
Badan penerima air	Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, danau)
	Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah akifer)
Bangunan pelengkap	Gorong-gorong
	Pertemuan saluran
	Bangunan terjunan
	Jembatan

Sarana	Prasarana
	<i>Street inlet</i>
	Pompa
	Pintu air

Sumber: SNI 03-1733-2004

F. Air Limbah

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan air limbah lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satunya adalah SNI-03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan, serta pedoman tentang pengelolaan air limbah secara komunal pada lingkungan perumahan yang berlaku sebagai berikut:

1. Jenis Elemen Perencanaan

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a. septik tank;
- b. bidang resapan; dan
- c. jaringan pemipaan air limbah.

2. Persyaratan, kriteria, dan kebutuhan

Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah yang memenuhi ketentuan perencanaan plambing yang berlaku.

Apabila kemungkinan membuat tangki septik tidak ada, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat disambung pada sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengolahan lain. Apabila tidak memungkinkan untuk membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah.

G. Jaringan Telepon

Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan telepon sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku,

terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan telepon lingkungan perumahan di perkotaan.

1. Jenis Elemen Perencanaan

Jenis prasarana dan utilitas jaringan telepon yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah:

- a. kebutuhan sambungan telepon; dan
- b. jaringan telepon.

2. Persyaratan, Kriteria, dan Kebutuhan

Beberapa persyaratan, kriteria, dan kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Penyediaan kebutuhan sambungan telepon

- 1) tiap lingkungan rumah perlu dilayani sambungan telepon rumah dan telepon umum sejumlah 0,13 sambungan telepon rumah per jiwa atau dengan menggunakan asumsi berdasarkan tipe rumah sebagai berikut:
- 2) dibutuhkan sekurang-kurangnya 1 sambungan telepon umum untuk setiap 250 jiwa penduduk (unit RT) yang ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan RT tersebut;
- 3) ketersediaan antar sambungan telepon umum ini harus memiliki jarak radius bagi pejalan kaki yaitu 200 - 400 m;
- 4) penempatan pesawat telepon umum diutamakan di area-area publik seperti ruang terbuka umum, pusat lingkungan, ataupun berdekatan dengan bangunan sarana lingkungan; dan
- 5) penempatan pesawat telepon harus terlindungi terhadap cuaca (hujan dan panas matahari) yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan kenyamanan pemakai telepon umum tersebut.

b. Penyediaan jaringan telepon

- 1) tiap lingkungan rumah perlu dilayani jaringan telepon lingkungan dan jaringan telepon ke hunian;
- 2) jaringan telepon ini dapat diintegrasikan dengan jaringan pergerakan (jaringan jalan) dan jaringan prasarana / utilitas lain;

- 3) tiang listrik yang ditempatkan pada area Damija (daerah milik jalan), lihat Gambar 1 mengenai bagian-bagian pada jalan pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar; dan
- 4) stasiun telepon otomatis (STO) untuk setiap 3.000 – 10.000 sambungan dengan radius pelayanan 3 – 5 km dihitung dari copper center, yang berfungsi sebagai pusat pengendali jaringan dan tempat pengaduan pelanggan.

H. Transportasi Lokal

Lingkungan perumahan direkomendasikan untuk dilalui sarana jaringan transportasi lokal atau memiliki akses yang tidak terlampaui jauh (maksimum 1 km) menuju sarana transportasi tersebut. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan transportasi sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan transportasi lingkungan perumahan di perkotaan.

Untuk kebutuhan dan persyaratan jaringan transportasi lokal pada lingkungan perumahan dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut ini.

Tabel 2.8 Kebutuhan dan Persyaratan Jaringan Transportasi Lokal pada Lingkungan Perumahan

No	Kebutuhan	Sarana Transportasi	Luas Lahan	Jangkauan	Keterangan
1	Fasilitas sarana transportasi umum lokal	Becak/andong	---	Melayani jalan lokal sekunder/primer	Pertimbangan khusus: • Jarak jangkauan pajalan kaki ideal ke titik transit lain/ daerah tujuan = 400 m ² • Jarak penempatan elemen penunjang fasilitas
		Ojek	---	Melayani jalan lokal sekunder/primer	
		Angkutan kota(roda 4, 2500 cc)	---	Melayani jalan kolektor sekunder	
		Mini bus (roda 6, 3500 cc)	---	Melayani jalan kolektor primer	
		Bus umum (roda 6, >3500 cc)	---	Melayani jalan arteri	
2	Fasilitas prasarana transportasi umum lokal	Terminal wilayah (tiap kecamatan)	2000 m ²	120.000 penduduk	
		Terminal wilayah (tiap kelurahan)	1000 m ²	30.000 penduduk	

Pangkalan oplet/angkot	500 m ²	120.000 penduduk
Pangkalan becak/andong	200 m ²	30.000 penduduk
Pangkalan ojek	200 m ²	30.000 penduduk
Halte	---	---
Parkir	---	---

2.4 Pariwisata

Menurut UU. No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara serta perjalanan itu sebagian atau seluruhnya bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Pariwisata merupakan sistem yang mengaitkan antara lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya, dan industri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang yang dilakukan keluar lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya dengan motivasi selain mencari nafkah di tempat tujuannya dan sekaligus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap alam dan budaya.

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan tamasya atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Secara teknik pariwisata diartikan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok dalam wilayah negara sendiri maupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa atau pelayanan dan faktor-faktor penunjang serta kemudahan-kemudahan lainnya yang diadakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Pengunjung dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu wisatawan dan ekskursionis. Wisatawan merupakan setiap orang yang datang dari suatu negara asing, yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur, dan yang di negara di mana ia tinggal untuk sementara itu membelanjakan uang yang didapatkannya di lain tempat. Menurut Soekadijo (2000:13) Ekskursionis adalah pengunjung yang hanya tinggal sehari di negara yang dikunjunginya, tanpa

bermalam. Hal tersebut juga meliputi orang-orang yang mengadakan pelayaran pesiar cruise passanger. Di dalamnya tidak termasuk orang-orang yang secara legal tidak memasuki sesuatu negara asing, seperti misalnya orang yang dalam perjalanan menunggu di daerah transit di pelabuhan udara.

Berdasarkan pengertian pariwisata beberapa pakar-pakar di atas maka pariwisata dapat disimpulkan sebagai suatu aktivitas perjalanan manusia melakukan refreshing, menikmati pemandangan alam atau pemandangan buatan yang dapat menghibur atau menyegarkan perasaan suatu manusia.

2.4.1 Daerah Tujuan Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia destinasi wisata memiliki 3 artian, yaitu:

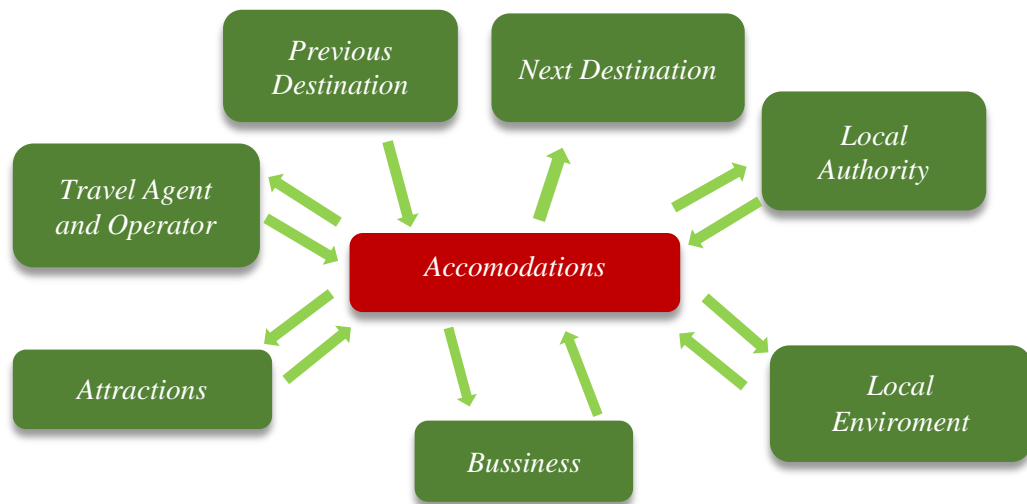
- a. Daerah yang memiliki objek wisata yang ditunjang oleh masyarakat dan prasarana pariwisata;
- b. Tempat yang menjadi sasaran kunjungan wisata;
- c. Daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisata.

2.4.2 Komponen Pendukung Pariwisata

Dalam buku Pengantar Pariwisata oleh Sukarsa, (1999), adapun komponen pendukung pariwisata, yaitu:

- a. Akomodasi

Akomodasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting serta merupakan kebutuhan dasar bagi wisatawan selama mereka berada di daerah tujuan wisata Cooper, (1996). Adapun arti penting akomodasi wisata yang dikutip melalui (Cooper dalam Sukarsa 1999) dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Peran Akomodasi dalam Pariwisata
Sumber: Cooper, 1999

Dalam industri pariwisata, akomodasi dapat dibedakan menjadi, yaitu akomodasi yang berbentuk hotel dan akomodasi di luar hotel seperti *inn*, *homestay* dan *bungalow*.

b. Jasa Pangan

Usaha jasa pangan diartikan sebagai suatu bangunan atau tempat usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum yang dikenal secara komersial. Adapun usaha jasa pangan meliputi restoran, rumah makan, jasa boga, dan bar. (Sukarsa, 1999).

c. Transportasi

Transportasi wisata adalah jasa untuk memindahkan wisatawan dari satu tempat ke tempat lain yang merupakan daerah tujuan wisata. Adapun jenis transportasi meliputi angkutan darat, laut, udara, danau dan sungai (Sukarsa 1999).

d. Atraksi Wisata

Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata diantaranya adalah natural amenities (benda-benda yang telah tersedia dan terdapat di alam), *Man Made Supply* (Hasil ciptaan manusia) dan *the way of life* (tata cara hidup masyarakat) (Sukarsa 1999).

2.4.3 Jenis-Jenis Fasilitas Wisata

Adapun jenis-jenis wisata alam menurut Kadir, (1995) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Fasilitas Utama

Yaitu fasilitas yang harus ada pada objek wisata seperti tempat rekreasi, tempat atraksi (panggung terbuka, tempat pameran, pementasan kesenian), tempat bermain (sarana olahraga);

2. Fasilitas Pelengkap

yaitu fasilitas yang membantu pengelolaan objek seperti tempat memperoleh informasi, penyewaan alat, pos keamanan, ruang pengelola, ruang perawatan pemeliharaan, ruang istirahat dan lain lain;

3. Fasilitas Penunjang

Yaitu fasilitas yang dapat memberikan kemudahan dalam berwisata, seperti penginapan, tempat makan, olahraga, dan lain-lain.

2.4.4 Bentuk-Bentuk Pariwisata

Menuru Muljadi (2009) pariwisata diklasifikasi ke dalam bentuk, sebagai berikut:

a. Pariwisata berdasarkan jumlah orang yang bepergian, yaitu:

- 1) Pariwisata individu/perorangan (*individual tourism*), yaitu bila seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukan sendiri dan memilih daerah tujuan wisata beserta programnya serta pelaksanaannya dilakukan sendiri; dan
- 2) Pariwisata kolektif (*collective tourism*), yaitu suatu usaha perjalanan wisata yang menjual pakatnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya.

b. Pariwisata berdasarkan motivasi perjalanan, yaitu

- 1) Pariwisata rekreasi (*recreational tourism*) adalah bentuk pariwisata untuk beristirahat guna memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan;
- 2) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat

tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk menikmati hiburan dan lain-lain;

- 3) Pariwisata budaya (*cultural tourism*) adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar adat istiadat dan cara hidup rakyat negara lain, studi-studi/riset pada penemuan-penemuan, mengunjungi tempat-tempat peninggalan kuno/bersejarah dan lain-lain;
 - 4) Pariwisata olahraga (*sports tourism*). Bentuk pariwisata ini dapat dibedakan menjadi dua kategori; 1) *Big Sports Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar yang menarik perhatian, baik olahragawannya sendiri maupun penggemarnya (*supporter*) dan 2) *Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu bentuk olahraga bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti; mendaki gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain;
 - 5) Pariwisata untuk urusan usaha (*business tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis, tetapi dalam perjalanannya hanya untuk melihat ekshibisi atau pameran dan sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk menikmati atraksi di negara yang dikunjungi; dan
 - 6) Pariwisata untuk tujuan konvensi (*convention tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah seprofesi dan politik. Tempat konferensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, modern dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta peralatannya, penginapan dan lain-lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan tour (kunjungan wisata).
- c. Pariwisata berdasarkan waktu berkunjung, yaitu:
- 1) *Seasonal tourism* adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk dalam kelompok ini musim panas (*summer tourism*) dan musim dingin (*winter tourism*); dan
 - 2) *Occasional tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diselenggarakan dengan mengaitkan kejadian atau event tertentu, seperti Galungan di Bali dan Sekaten di Jogja.

- d. Pariwisata berdasarkan objeknya, yaitu:
- 1) *Cultural tourism* adalah jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah/tempat, seperti peninggalan nenek moyang, benda-benda kuno dan sebagainya;
 - 2) *Recuperational tourism* yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit;
 - 3) *Commercial tourism* adalah perjalanan yang dikaitkan dengan perdagangan seperti penyelenggaraan *expo, fair, exhibition* dan sebagainya; dan
 - 4) *Political tourism* adalah suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara.
- e. Pariwisata berdasarkan alat angkutan, yaitu:
- 1) *Land tourism* adalah jenis pariwisata yang di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kendaraan darat seperti bus, kereta api, mobil pribadi atau taksi dan kendaraan darat lainnya;
 - 2) *Sea or river tourism* adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi air seperti kapal laut, ferry dan sebagainya; dan
 - 3) *Air tourism* adalah kegiatan pariwisata yang menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.
- f. Pariwisata berdasarkan umur, yaitu:
- 1) *Youth tourism* atau wisata remaja adalah jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja dan pada umumnya dengan harga relatif murah dan menggunakan sarana akomodasi *youth hostel*; dan
 - 2) *Adult tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang berusia lanjut. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang menjalani masa pensiun.

2.4.5 Komponen Produk Wisata

Mason (2000) dalam Budiarti dkk, (2021) telah membuat rumusan tentang komponen-komponen produk wisata, yaitu:

- a. Atraksi merupakan daya tarik wisata, baik alam, budaya maupun buatan manusia seperti festival atau pentas seni;

- b. Aksesibilitas merupakan kemudahan untuk mencapai tempat tujuan wisata; dan
- c. Amenitas merupakan fasilitas untuk memperoleh kesenangan. Dalam hal ini dapat berbentuk akomodasi, kebersihan dan keramahmatan (*Tangible and Intangible Products*).

Cooper (1997) dalam Dariwu & Waani (2016) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi wisata untuk pengembangan potensi kepariwisataan, yaitu:

a. Aksi (*Attraction*)

Menurut Yoeti (1996) ada tiga syarat dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam berbagai pasar, yaitu:

1. *Something to see*

Artinya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain;

2. *Something to do*

Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu;

3. *Something to buy*

Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang cendera mata dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

b. Amenitas (*Amenity*)

Segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada pada destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan dan sarana ibadah sebaiknya tersedia juga di sebuah destinasi Ismayanti dkk, (2010).

c. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Isdarmanto (2016) aksesibilitas adalah sarana yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuan. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Pengertian aksesibilitas tidak terbatas pada alat angkutan (transportasi) yang dapat membawa wisatawan dari tempat asalnya dan kembali ke tempat asalnya, tetapi juga meliputi semua aspek yang memperlancar dalam melakukan perjalanan.

d. Promosi dan Informasi

Yoeti (1997) hal terakhir yang diperlukan adalah publikasi atau promosi. Kapan iklan dipasang, ke mana leaflets/brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya. Fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya:

- 1) Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan kedaerahannya dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya;
- 2) Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata;
- 3) Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri; dan
- 4) Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu yang akan datang.

2.4.6 Unsur-Unsur Pariwisata

Kurniawan (2015), Pariwisata yang baik harus memiliki daya tarik, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Pengembangan pariwisata perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya

alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup. unsur-unsur pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Atraksi

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

b. Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau keelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih singkat).

c. Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.

d. Fasilitas Pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

e. **Infrastruktur**

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

2.4.7 Tujuan Pengadaan Fasilitas Wisata

Adapun tujuan disediakannya fasilitas wisata menurut Kadir, (1995:5) adalah sebagai, berikut:

- a. Ditinjau dari aspek pariwisata, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan memperlama masa tinggal wisatawan;
- b. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, bertujuan menganekaragamkan perekonomian, memperluas lapangan usaha dan kerja;
- c. Ditinjau dari aspek sosial budaya, bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya serta memupuk kreatifitas dan bakat seni masyarakat;
- d. Ditinjau dari aspek lingkungan dan sumber daya alam, bertujuan untuk memotivasi usaha pengembangan dan pembinaan lingkungan alam dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan;
- e. Ditinjau dari aspek manusia, bertujuan untuk memulihkan kesegaran dan mendapatkan kesenangan atau hiburan.

2.4.8 Petunjuk Operasional Pengadaan Sarana Pengunjung Wisata

a. **Pengembangan Daya Tarik Wisata**

Pengembangan daya tarik wisata sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata menurut Peraturan Menteri Pariwisata No 3 Tahun 2018, mencakup:

- 1) Pembangunan pusat informasi wisata/TIC (*Tourism Information Center*) dan perlengkapannya;
- 2) Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;

- 3) Pembuatan pergola;
- 4) Pembuatan gazebo;
- 5) Pemasangan lampu taman;
- 6) Pembuatan pagar pembatas;
- 7) Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) Pembangunan kios cenderamata;
- 9) Pembangunan plaza / pusat jajanan kuliner;
- 10) Pembangunan tempat ibadah;
- 11) Pembangunan menara pandang (*viewing deck*);
- 12) Pembangunan gapura identitas;
- 13) Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak/jalan dalam kawasan, *boardwalk*, dan tempat parkir; dan
- 14) Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.

b. Petunjuk Teknis Pembangunan Pusat Informasi Wisata

1) Konsep dasar

Konsep dasar pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC adalah menyediakan fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan terbaru (*update*) kepada siapa saja yang membutuhkan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan zaman, maka fungsi Pusat Informasi Wisata/TIC dapat menjadi tempat melakukan promosi bagi sebuah destinasi dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan yang berkunjung.

2) Kriteria penempatan lokasi pusat

Berikut ini jenis Pusat Informasi Wisata/TIC berdasarkan penempatan lokasi bangunan. Pemerintah Daerah diperbolehkan memilih jenis Pusat Informasi Wisata/TIC yang sesuai dengan kemampuan dan yang paling merepresentasikan daerah masing-masing:

- a) Pusat Informasi Wisata/TIC yang terletak di pusat kota, lokasi yang dipilih harus strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung, disarankan dipilih lokasi yang aksesibilitasnya mudah dicapai, baik menggunakan transportasi umum maupun transportasi pribadi;

- b) Pusat Informasi Wisata/TIC yang terletak di tempat kedatangan, lokasi yang dipilih di tempat kedatangan seperti: terminal bus, bandara, stasiun, maupun pelabuhan, harus strategis, mudah dilihat, dan mudah dicapai oleh pengunjung; dan
 - c) Pusat Informasi Wisata/TIC yang terletak di daya tarik wisata, lokasi yang dipilih di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata harus strategis, mudah dilihat, dan mudah dicapai oleh pengunjung.
- 3) Ketentuan teknis dan kriteria desain pusat informasi wisata/TIC
- a) Standar dimensi Pusat Informasi Wisata/TIC: luas bangunan tidak lebih dari 80 m².
 - b) Pengelolah: manajerial, staf yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kemampuan berbahasa asing (bahas inggris), serta pramu ruang.
 - c) Sarana dan prasarana: telepon, faks, internet, komputer, printer, *scanner*, meja, kursi/sofa, materi promosi pariwisata, peta, peralatan keamanan, instalasi listrik, serta peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu

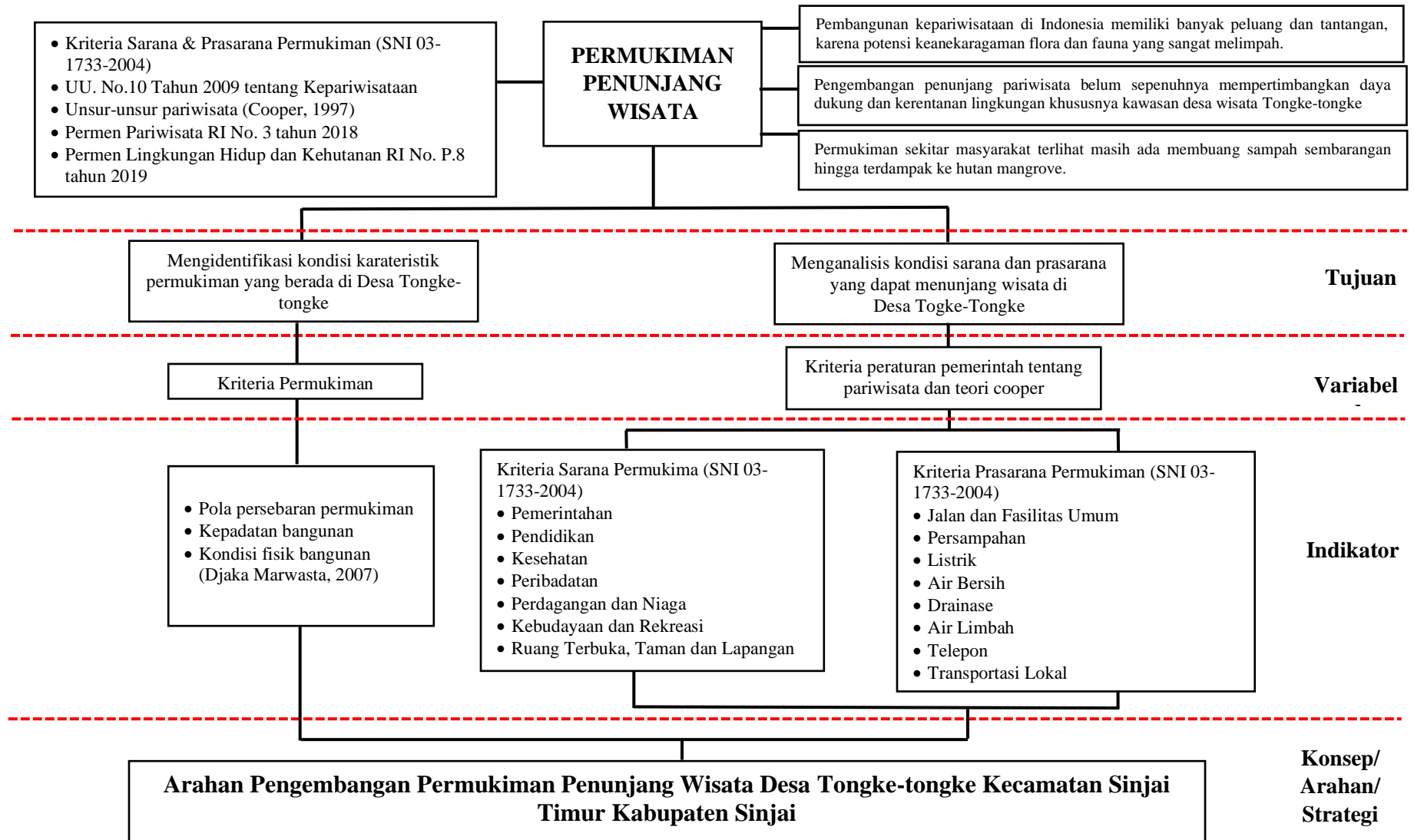
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
1.	(Lestari, 2019)	Sejarah Hutan Mangrove Tongke-tongke di Kabupaten Sinjai	Analisis kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan mangrove mengalami perkembangan pesat terutama setelah menjadi obyek wisata alam yang menyebabkan banyak wisatawan yang datang berkunjung dan ini berdampak pada pelaku ekonomi yang turut berpartisipasi serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik.	Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri (2019).
2.	(Hidayatullah , 2016)	Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Tongke - tongke, Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Timur	Analisis Deskriptif, Analisis Spasial.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek fasilitas ekowisata hutan mangrove Tongke-tongke telah memiliki fasilitas namun belum memadai.	Jurnal, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (2015).
3.	(Hariadi, 2019)	Pengembangan Permukiman Lembanna Sebagai Penunjang Wisata Minat Khusus Gunung Bawakaraeng di Sulawesi Selatan	Analisis Deskriptif Kualitatif, Kuantitatif, Komparatif.	Hasil penelitian ini memberikan arahan pengembangan wisata berupa Pusat informasi wisata, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kebersihan, Ruang ganti dan toilet, Pusat kuliner dan cinderamata, Peningkatan kualitas jalan, Peningkatan kualitas parkir, Rambu-rambu lalu lintas dan papan petunjuk arah wisata, Pedestrian, Gapura identitas.	Skripsi, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, (2019).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
4.	(Budiarti, 2021)	Arahan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Pincara Kabupaten Luwu Utara	Kualitatif Deskriptif dan Data Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Pincara merupakan desa wisata yang layak dikembangkan dengan potensi desa unggulan untuk lebih meningkatkan strategi pembangunan yang dilakukan dalam bentuk Rencana Induk pengembangan kawasan Desa Wisata, memaksimalkan pengolahan potensi wisata, meningkatkan kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa, memanfaatkan hubungan fungsional desa-desa di sekitarnya	Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP) Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar (2021).
5.	(Attar, 2013)	Analisis Potensi & Arahan Strategi Kebijakan Pengembangan Desa ekowisata Di Kecamatan Bumiaji –Kota batu	Analisis Deskriptif, SWOT, Analisis Spasial.	Hasil analisis spasial menunjukkan Desa Tulungrejo merupakan desa yang paling optimal untuk pengembangan desa ekowisata di Kecamatan Bumiaji. Analisis Matrik <i>Grand Strategy</i> menunjukkan arahan strategi kebijakan pengembangan Desa Ekowisata di Desa Tulungrejo terletak pada kuadran 1, strategi yang digunakan bersifat agresif (SO).	<i>Journal of Indonesian Tourism and Development Studies</i> (2013).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Sumber Literatur
6	(Pratama, 2020)	Program KOTAKU: Studi Penanganan Program Permukiman Berkelanjutan di Kawasan Pesisir	Analisis Deskriptif, Kualitatif, Grand Teori	Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa program penanganan permukiman telah mengatasi beberapa permasalahan namun secara aspek berkelanjutan belum memenuhi seperti pada aspek ekonomi dan social.	<i>Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences Vol 11 (07) 2021.</i> Program Magister Sekolah Pascasarjana Unhas 2021.

2.5 Kerangka Konsep

Alur pikir mengenai konsep penelitian dapat ditinjau pada **Gambar 2.1** berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Konsep